

Lindungi Hak-hak Pekerja di Era

Dari Halaman 1

pengantar, hingga laboratorium data, para pekerja berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penerapan teknologi baru harus menghormati norma-norma perubahan lain di tempat kerja: pekerja memiliki hak untuk diajak berkonsultasi dan diikutsertakan.

Hak dasar dan demokratis di tempat kerja ini akan memastikan penggunaan AI dirancang dengan mengutamakan keselamatan, keadilan, dan martabat.

"Pekerja dan serikat pekerja, harus memiliki tempat di meja perundingan demi kepentingan semua orang," sebutnya.

Penerapan teknologi baru, seperti AI, tanpa

Bobby Ajak KPK Awasi Pemda di Sumut

Dari Halaman 1

Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan KPK, dalam pertemuan tersebut Bobby sempat membahas ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini diperiksa terkait kasus dugaan korupsi.

"Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah kami yang sedang diperiksa sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya," kata Bobby dikutip dari siaran pers yang dibagikan oleh KPK, Senin (28/4).

Menurut menantu dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas kepala daerah, melainkan juga harus diperkuat dengan pembersihan sistem politik dan tata kelola pemerintahan di daerah.

Atas dasar itu dia meminta KPK agar memperkuat kehadiran di daerah, tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.

"Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih: apakah kita ingin ikut rusak atau menjaga diri kita tetap bersih," tutur Bobby.

"Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering.

Soeharto Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional

Dari Halaman 1

TV, Senin (28/4)

Akan tetapi, kata Radik, usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional yang disampaikan Kemensos ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 itu tak disetujui.

"Nah, memang waktu itu tahun 2010 Pak Soeharto belum ditetapkan sebagai presiden (red-pahlawan nasional) seperti itu, tahun 2015 diusulkan kembali untuk diusulkan sebagai calon pahlawan nasional," ujarnya.

"Dan itu diusulkan oleh gubernur Jawa tengah dengan rekomendasinya dan memang tahun 2015 juga sama belum mendapatkan penetapan sebagai pahlawan nasional dari presiden," kata Radik menambahkan.

Radik menyebut Soeharto kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 2025 ini oleh salah satu pemerintah provinsi.

Dedi Mulyadi Tak Gentar Diultimatum

Dari Halaman 1

kan rasa aman kepada masyarakat Jawa Barat dan para investor. Ia mengaku tidak takut terhadap ancaman apapun.

"Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun," ungkapny.

Dedi mengatakan, dirinya tidak anti kritik. Namun begitu, kritik yang disampaikan, harus bersifat bermanfaat bagi masyarakat Jabar.

Komisi I Kecam KB Tembaki Ketua

Dari Halaman 1

gan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (28/4).

Ia menilai tindakan yang dilakukan KKB terhadap rombongan Ketua Komnas HAM Frits Ramandey ini telah melebihi batas karena telah menyerang sosok pelindung HAM.

Simbol Perjuangan Kaum Pekerja

Dari Halaman 1

aksi yang menuntut perbaikan kondisi kerja, upah yang layak, dan hak-hak dasar lainnya.

Sejarah Hari Buruh di Indonesia

Di Indonesia, jejak perjuangan buruh sudah muncul sejak masa kolonial. Salah satu tonggak awalnya adalah pemberontakan besar di Jambi pada tahun 1916. Kondisi kerja yang buruk serta tingginya pajak memicu perlawanan rakyat dan menuntut hak-hak rakyat serta keadilan sosial.

Sebagai respons, pemerintah kolonial membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1917. Namun, badan tersebut ditolak oleh masyarakat karena anggotanya dipilih langsung oleh penguasa kolonial dan dianggap tidak mewakili suara rakyat.

Hari Buruh pertama kali diperingati di Indonesia pada 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwee di Semarang. Para pekerja saat itu menghadapi jam kerja panjang dengan upah rendah.

Sejumlah organisasi seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, hingga Insulinde membentuk aliansi bernama Radicale Concentratie atau Konsentrasi Radikal yang

konsultasi yang tepat dengan pekerja dan serikat pekerja mereka telah menyebabkan masalah serius di seluruh dunia:

Di Filipina, pengantar barang berusia 19 tahun Jasper Dalman meninggal saat bekerja untuk Foodpanda. Serikat pekerjaanya, RIDERS-SENTRO, memenangkan pengakuan dan hak asuransi setelah kematiannya menyoroti konsekuensi mematikan dari eksploitasi algoritmik yang menetapkan target produktivitas yang mustahil.

Di Turki, moderator konten TikTok yang dipekerjakan oleh Telus dipecat setelah mengorganisasi perlawanan terhadap beban kerja yang dikelola AI yang tidak manusiawi dan konten yang menimbulkan trauma.

Di AS, perawat yang bekerja melalui platform menghadapi aplikasi shift yang dikendalikan AI

KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Agung Yudha Wibowo mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menjadi dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah bebas dari korupsi atau tidak.

"Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu," kata Agung.

Dia memastikan KPK akan terus berperan aktif dalam upaya mencegah korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.

Meskipun demikian, Agung mengingatkan KPK tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara KPK, eksekutif dan legislatif agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

"Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah," imbuhnya.

Mengacu pada Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSPP) KPK tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02.

Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah yakni 63.

Sementara itu, tujuh area lainnya yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan

Ia juga menegaskan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional masih dalam kajian tim peneliti Kemensos sebelum direkomendasikan kepada Menteri Sosial Syaifullah Yusuf.

"Memberikan rekomendasi kepada menteri sosial untuk siapa-siapa nanti akan diusulkan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional," ujarnya.

Nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional yang ditetapkan pada 2025 ini.

Meski begitu, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai pemimpin Orde Baru itu tak layak mendapat gelar pahlawan karena pemerintahannya berlumuran darah.

Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu mengungkapkan Kemensos belum memberi

"Saya akan mendengarkan kritik siapa-pun, kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Sebelumnya Juru Bicara Ketum GRIB Jaya Hercules, Razman Arif Nasution mengultimatum Dedi Mulyadi. Razman meminta Dedi tidak mengganggu kegiatan ormas yang dapat berpotensi menjadi konflik.

Anggota GRIB diduga terlibat aksi kekerasan beberapa hari lalu ketika polisi hendak me-

Terlebih, kata dia, Komnas HAM juga sedang menjalani tugas yang dilindungi dan diamankan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, ia berharap aparat memperkuat keamanan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan tembakan itu.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," jelas dia.

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungny.

Kendati demikian, Hasanuddin mengingatkan segala tindakan yang diambil aparat terhadap para pelaku harus sesuai hukum yang berlaku.

menggelar aksi mogok serentak pada hari itu.

Namun, peringatan Hari Buruh terhenti sejak 1927 karena tekanan pemerintah kolonial serta pendudukan Jepang yang melarang kegiatan politik dan menangkap aktivis buruh.

Pascakemerdekaan, Hari Buruh kembali diperjuangkan. Pada 1946, rakyat Indonesia kembali memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh. Dua tahun kemudian, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang mengatur hak-hak dan jaminan setiap buruh.

Pada era awal kemerdekaan, terutama hingga awal 1950-an, Hari Buruh dirayakan secara terbuka dan menjadi simbol kekuatan sosial dari gerakan pekerja Indonesia.

Namun, perubahan drastis terjadi pada masa Orde Baru. Mulai tahun 1967, perayaan Hari Buruh tidak lagi diperkenankan secara terbuka. Pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto menekan gerakan buruh dengan dengan membatasi ruang gerak serikat pekerja dan mengaburkan keberadaan UU Nomor 12 Tahun 1948.

Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, peringatan Hari Buruh kembali marak di berbagai daerah. Serikat-serikat buruh yang sempat dilarang mulai bermunculan

yang melewati perlindungan pekerja yang menciptakan kondisi berbahaya bagi mereka dan pasien mereka.

*Seruan ITUC

Keterlibatan penuh serikat pekerja dalam desain dan penerapan AI di tempat kerja.

Teknologi yang transparan dan berpusat pada manusia yang menjunjung tinggi hak dan keselamatan.

Konvensi ILO yang mengikat tentang platform kerja untuk melindungi semua pekerja dalam ekonomi digital.

"Pada 28 April 2025 ini, kita mengenang mereka yang telah meninggal, dan kita akan terus berjuang untuk mereka yang masih hidup. Teknologi seharusnya bekerja untuk kita, bukan melawan kita," kata Yusuf, mengakhiri.(js)

publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak berhasil mencatatkan skor di atas 80.

Berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara, tercatat sebanyak 170 perkara yang ditangani sepanjang 2023 hingga Desember 2024.

Terdapat beberapa modus yang dilakukan, seperti penyalahgunaan anggaran (44 persen), pengadaan barang dan jasa (42 persen), sektor perbankan (7 persen), pemerasan atau pungutan liar (3 persen), dan sisanya mencakup modus lain (4 persen).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menambahkan pemberantasan korupsi bukan sekadar soal regulasi atau besar kecilnya gaji pejabat, melainkan tentang integritas hati dan pikiran.

"Gaji besar atau kecil tidak menjadi jaminan. Kalau hati dan pikiran tetap rakus, korupsi akan tetap terjadi," kata Johanis di hadapan delapan perwakilan pemerintah daerah yang hadir yakni Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Johanis mengingatkan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

"Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga," pungkasnya.(cnni/js)

balasan perihal surat terbuka penolakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

"Untuk saat ini belum ada surat balasan resmi dari Dirjen Pemberdayaan Sosial khususnya mengenai surat yang kami ajukan baik melalui e-mail maupun tertulis," ujar Jane Rosalina selaku perwakilan dari koalisi saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (21/4).

Di sisi lain, Putri mantan Presiden ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto angkat suara soal usulan ayahnya untuk diangkat menjadi pahlawan nasional.

Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan.

"Buat kami keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar, Pak Harto adalah pahlawan buat kami dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai beliau," katanya.(cnni/js)

nangkap pimpinan GRIB di Depok, Jawa Barat. Mereka juga membakar tiga mobil polisi.

Polisi telah menangkap tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Dari ketujuh tersangka itu, enam di antaranya merupakan anggota GRIB.

Tiga mobil polisi hangus dibakar sejumlah orang saat hendak menangkap tokoh masyarakat pelaku penganiayaan di Kampung Baru, Harjamukti, Kota Depok, Jumat (18/4) dini hari.(cnni/js)

"Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum," tutur dia.

Sebelumnya, Fitri bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4)..(cnni/js)

kembali. Aksi massa pun rutin digelar setiap 1 Mei, menandai kembalinya ruang demokrasi bagi kaum pekerja.

Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 29 Juli 2013, Presiden SBY menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2014 dan disambut antusias oleh kalangan buruh.

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB, tanggal 1 Mei 2025 resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Setiap tahun, Hari Buruh di Indonesia tidak hanya dirayakan dengan aksi demonstrasi damai oleh serikat pekerja, tetapi juga menjadi momen refleksi bersama mengenai kondisi perburuhan di Tanah Air.

Hari Buruh tetap menjadi simbol solidaritas dan kekuatan para pekerja dalam memperjuangkan hak-hak yang adil dan manusiawi.

Hari Buruh terus menjadi pengingat bahwa keadilan sosial bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan panjang yang tak boleh dilupakan.(cnni/js)

Kejagung Periksa Dua

Dari Halaman 1

Sementara yang kedua yakni Herdiyanto Sutantyo (HS) selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Senin (28/4) kemarin.

"Ada hakim yang diperiksa terkait dengan kalau tidak salah gugatan perdata yang di pengadilan yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan onslagt," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/4).

Selain kedua hakim itu, Kejagung memeriksa saksi lainnya yakni Konsultan Pembiayaan di PT Muara Sinergi Mandiri berinisial DSR dan Kasubag Kepegawai/Ortala pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, YW.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," tuturnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan total delapan orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait vonis lepas di perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021-2022.

Kedelapan tersangka itu Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, pengacara Marcella Santoso dan Ariyanto, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan.

Kemudian ketiga Majelis Hakim pemberi vonis lepas yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom. Serta Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut uang suap sebesar Rp60 miliar berasal dari tim legal dari PT Wilmar Group.

Ia mengatakan, uang suap itu diberikan setelah adanya pesan dari PN Jakpus agar perkara tersebut harus segera diurus karena Majelis Hakim bisa memberikan hukuman maksimal melebihi tuntutan Jaksa.(cnni/js)



Buruh di Era Digitalisasi

Dari Halaman 1

sebelumnya memakan waktu dan tenaga kini dapat dilakukan dalam hitungan detik. AI menjanjikan efisiensi dan produktivitas yang tak terbayangkan. Namun, di balik janji kemajuan itu, mengintai bahaya laten yang kian mengancam eksistensi kaum pekerja.

Kita menyaksikan perubahan struktur kerja yang drastis. Otomatisasi menggantikan tenaga manusia di berbagai sektor, dari pabrik hingga layanan konsumen. Robot telah mengambil alih peran kasir, AI menggantikan analisis data, bahkan jurnalis dan seniman digital mulai terusik oleh kecerdasan buatan yang bisa menulis, melukis, dan mencipta. Pekerja bukan lagi jantung produksi, melainkan bagian yang perlahan tereliminasi.

Indonesia pun tidak luput dari pusaran ini. Di sektor manufaktur, banyak perusahaan yang beralih ke teknologi otomatis demi efisiensi biaya. Di sektor jasa, platform digital menjamur, merevolusi hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja menjadi relasi berbasis algoritma. Kurir, pengemudi daring, tenaga freelance—mereka bekerja tanpa kepastian upah, perlindungan sosial, dan jaminan masa depan.

Ironisnya, teknologi yang diciptakan manusia justru menciptakan ketimpangan baru yang tak kalah bengis dibanding kapitalisme konvensional. Ketika perusahaan raksasa teknologi terus menangguk laba, jutaan pekerja terjebak dalam pekerjaan informal, tak terlindungi, dan mudah digantikan. Mereka tak memiliki suara dalam menentukan nasibnya sendiri.

Laporan ITUC 2024 menyoroti bahwa hanya 20% pekerja di sektor platform yang memiliki akses pada perlindungan sosial dasar. Di sisi lain, 85% pendapatan digital global terkonsentrasi pada lima perusahaan raksasa teknologi dunia. Ini adalah ketimpangan struktural yang sangat akut. Jika dibiarkan, digitalisasi akan menjadi alat penindasan baru dalam wujud algoritma dan perangkat lunak.

Di sinilah peran negara menjadi sangat penting. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai fasilitator inovasi, tapi juga sebagai pelindung hak dasar pekerja. Regulasi yang jelas dan berpihak kepada buruh digital mutlak diperlukan. UU Cipta Kerja yang justru melonggarkan perlindungan tenaga kerja harus dievaluasi secara kritis. Negara tidak boleh menjadi perpanjangan tangan pasar bebas, melainkan pelindung keadilan sosial.

Selain regulasi, literasi digital bagi pekerja juga menjadi kebutuhan mendesak. Dalam banyak kasus, pekerja platform digital tidak memahami hak-haknya karena relasi kerja yang kabur dan model bisnis yang membingungkan. Negara, serikat buruh, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam edukasi para pekerja tentang hak digital, privasi data, dan etika AI.

Perjuangan buruh di era digitalisasi juga harus memperluas bentuk solidaritas. Jika dahulu buruh bersatu melalui serikat dan pabrik, kini mereka harus membangun solidaritas lintas platform, lintas negara, dan bahkan lintas sektor. Inilah bentuk baru perlawanan yang tidak melawan mesin, tapi melawan ketimpangan struktur yang dibangun atas nama teknologi.

May Day tahun ini seharusnya tidak lagi hanya tentang upah dan jam kerja. Ia adalah panggilan moral untuk menegakkan martabat manusia dalam ekosistem kerja yang kian tidak manusiawi. Teknologi tidak boleh menjadikan manusia sebagai alat; sebaliknya, manusia yang harus mengendalikan arah perkembangan teknologi.

Jika tidak diantisipasi, revolusi industri keempat akan menjadi bencana kemanusiaan yang lebih buruk dari krisis ekonomi. Akan ada generasi pekerja yang tidak lagi dibutuhkan, dan lebih parah: tidak tahu harus menjadi apa. Maka, reformasi pendidikan dan pelatihan ulang keterampilan (reskilling dan upskilling) juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan ketenagakerjaan.

Indonesia masih punya peluang untuk mengarahkan transformasi digital ke arah yang lebih adil. Investasi teknologi harus dibarengi dengan kebijakan redistributif, seperti jaminan sosial universal dan pajak teknologi. Startup dan platform digital harus tunduk pada regulasi ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak pekerjajnya.

Satu hal yang tak boleh dilupakan: buruh bukan sekadar alat produksi. Mereka adalah manusia yang berhak atas penghormatan layak, perlindungan sosial, dan masa depan yang bermartabat. Tanpa mereka, teknologi hanyalah setumpuk kabel dan kode tanpa makna.

Mari jadikan May Day tahun ini bukan sekadar perayaan simbolik, tetapi momentum untuk merumuskan ulang masa depan dunia kerja. Sebuah masa depan di mana manusia dan teknologi berjalan berdampingan, bukan saling menggantikan.